

## **Ketua Parlemen Norwegia dan Ketua Panja SDGs sepakat bahwa isu pembangunan berkelanjutan memerlukan peran partai politik**

Dalam rangka penguatan peran parlemen dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) melakukan kunjungan kerja ke Norwegia. Secara khusus kunjungan tersebut memiliki tujuan untuk memperdalam peran parlemen di dalam tahap implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah disepakati pada bulan September 2015 yang lalu dan indicator tujuan disepakati pada bulan Maret 2016 yang baru lalu. Kunjungan kali ini juga memiliki fokus untuk memperdalam bagaimana parlemen dapat berkontribusi lebih banyak dalam tahap implementasi SDGs terutama di dalam dimensi pembangunan ekonomi hijau.

“Norwegia yang merupakan salah satu negara terdepan di dalam memajukan isu-isu pembangunan berkelanjutan di dalam negaranya, terutama di dalam permasalahan lingkungan. Hubungan antara Indonesia dan Norwegia yang sudah terjalin sejak lama sudah berevolusi dari perdagangan menjadi partner yang membangun kerjasama yang mutual. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kerjasama di bidang lingkungan seperti REDD+ (*Reducing Emission from Degradation and Deforestation*) and juga kerjasama maritim di bidang IUU (*Illegal, Unreported and Unregulated*) fishing”, papar Ketua Panitia Kerja SDGs, Nurhayati Ali Assegaff .

Delegasi BKSAP DPR RI dipimpin oleh Nurhayati Ali Assegaff (F-PD) dan anggota delegasi adalah Sarwo Budi Wiryanti Sukamdani (FPDIP), Irine Yusiana Roba Putri (F-PDIP), Siti Hediati Soeharto (F-PG), Muhammad Syarifudin (F-PAN), Sofwatillah Mohzaib (P Demokrat), Siti Masrifah (F-PKB), Kartika Yudhisti (F-PPP), Andi Iwan Darmawan Aras (F-Gerindra, Hamdhani (F-Nasdem), dan Arief Suditomo (F-Hanura)

Di dalam pertemuan dengan parlemen Norwegia (Stortinget), anggota Panja SDGs memiliki kesempatan untuk berdiskusi mengenai keterlibatan parlemen di dalam isu-isu pembangunan berkelanjutan dengan Ketua Parlemen, **Mr. Olemmic Thomessen**. Perlu diketahui bahwa seluruh partai politik yang ada di Norwegia yang akan menghadapi pemilihan pada tahun sedang menyusun program kerja yang akan menarik minat konstituen yang dimana di

dalam program kerja tersebut, isu-isu pembangunan berkelanjutan secara nasional dan daerah diangkat. Partai-partai politik di Norwegia juga secara kolektif sering menginisiasi debat dan mengadakan workshop mengenai pembangunan berkelanjutan di daerah pilihan. “Proses untuk memperkenalkan SDGs kepada dengan baik kepada publik seharusnya dimulai dari perubahan paradigma partai politik itu sendiri. Sudah selayaknya parlemen dan seluruh jajaran di partai politik mengerti tentang permasalahan pembangunan berkelanjutan”, ujar Mr.Olemnic Thomessen.

Ketua parlemen Norwegia juga terkesan dengan keberadaan Panja SDGs yang sudah berperan aktif di dalam mendorong pembentukan Komite Bersama dan memberikan rekomendasi tahunan kepada pemerintah dan DPR RI mengenai langkah-langkah yang dapat diambil bersama-sama untuk menyukseskan SDGs. Di dalam kesempatan ini, Ketua Panja juga mengundang Ketua Parlemen, Mr.Olemic Thomessen untuk hadir ke World Parliamentary Forum on Sustainable Development yang akan diadakan pada bulan September 2016 mendatang di Nusa Dua, Bali.

Terkait dengan Tujuan ke-13 dari TPB dan penandatanganan perjanjian COP-21 yang akan dilakukan pada 22 April 2016, parlemen Norwegia juga menyampaikan bahwasanya mereka sedang mensosialisasikan ratifikasi Paris Agreement di tingkat nasional. “Ketika bayi lahir, mereka langsung mengerti apa itu terorisme sedangkan mereka belum tentu mengerti apa itu perubahan iklim. Padahal perubahan iklim memberikan dampak yang lebih besar kepada keberlanjutan generasi penerus manusia daripada isu terorisme, contohnya saja tsunami ataupun kekeringan di area-area yang merugikan masyarakat” ujar Ketua delegasi Indonesia, Dr Nurhayati Ali Assegaf, yang menegaskan bahwa ratifikasi perjanjian tersebut harus diiringi dengan pendalaman publik tentang permasalahan perubahan iklim. (BKSAP)